

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara republik yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, budaya, ras, adat-istiadat, gender, bahasa, strata sosial, dan golongan. Unsur-unsur tersebut membuat Indonesia menjadi negara yang multikultural dan menjadikan bangsa Indonesia adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pluralisme menjadi sebuah hal yang lumrah dan sudah seharusnya diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. Menurut Liliweri (2005, h.57), “masyarakat multikultural adalah masyarakat yang struktur penduduknya terdiri dari beragam etnik dan keragaman itu menjadi sumber keragaman kebudayaan atau subkultur dari masing-masing etnik”. Karena masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang multikultural, maka Pluralisme menjadi sebuah hal yang lumrah dan sudah seharusnya diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pluralisme itu sendiri adalah keberadaan atau toleransi keragaman etnik atau kelompok-kelompok kultural dalam suatu masyarakat atau negara, serta keragaman kepercayaan atau sikap dalam suatu badan, kelembagaan, dan sebagainya (Abdullah, 2001: 13)

Kemajemukan tersebut kemudian membentuk identitas dan jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang sarat akan kemajemukan pluralistik. Melalui proses sejarah, terbentuklah lima buah prinsip yang merupakan identitas bangsa Indonesia dan turut mendasari segala hukum dan tata cara negara. Kelima prinsip tersebut dikenal

sebagai Pancasila. Pancasila adalah dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia (Abdulkarim, 2008: 11). Pancasila merupakan pedoman bagi masyarakat dan seluruh bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai dasar negara, Pancasila juga merupakan landasan agar bangsa Indonesia tetap kokoh berdiri dalam menghadapi berbagai persoalan.

Tidak hanya Pancasila, namun bangsa Indonesia juga memiliki semboyan berupa “Bhinneka Tunggal Ika” yang menjadi landasan bagi kesatuan bangsa Indonesia. “Secara harfiah, “Bhinneka Tunggal Ika” yang memiliki arti “Beraneka Satu Itu” apabila jika diartikan akan memiliki makna kurang lebih walaupun berbeda-beda tapi pada hakikatnya tetap satu kesatuan (UUD 1945 & Amandemen, 2016, h.53)”. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang terdiri dari beraneka ragam suku, ras, budaya, agama, dan bahasa.

Meskipun Indonesia sarat dengan kemajemukan pluralistik, namun semboyan ini memiliki makna yang tercermin pada masyarakat Indonesia yang diikat dengan prinsip kesatuan dan kesatuan bangsa yang dikenal dengan “Bhinneka Tunggal Ika”. Bahwa berdasarkan semboyan ini, seluruh masyarakat Indonesia harus menyadari kekuatan akan kerukunan beragama, berbangsa dan bernegara. Tanpa persatuan, sikap toleran, dan budaya saling menghormati, Indonesia akan hancur dan jauh dari ketenteraman dan damai.

Kerukunan umat beragama adalah bagian yang sangat penting dalam konteks kepentingan bangsa. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjadama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Nama Pancasila yang diciptakan oleh Presiden Soekarno tidak hanya berperan sebagai nama atas lima prinsip dasar negara Indonesia, namun juga berfungsi sebagai ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia (Abdulkarim, 2008: 12). Mencintai Indonesia dengan segala keberagamannya dan hidup berdampingan di tengah-tengah perbedaan merupakan perwujudan dari Bhinneka Tunggal Ika. Apabila masyarakat Indonesia memiliki karakter dan jati diri berdasarkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, maka bangsa Indonesia yang majemuk dan multikultural dapat semakin rukun dan bersatu. Maka dari itu, salah satu nilai penting dalam pluralisme adalah toleransi (Suseno, 2015: 30)

Persatuan dan kerukunan antar umat beragama perlu dipertahankan untuk menjaga keharmonisan di dalam negara Indonesia sendiri. Namun sangat disayangkan, keragaman itu sendiri yang justru memancing perpecahan. Terdapat banyak sekelompok orangoknum yang menyulut api permusuhan dengan cara menunggang isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Aliran).

Dewasa ini, Bhinneka Tunggal Ika sedang menghadapi tantangan oleh kelompok-kelompok yang menggunakan politik sebagai sarana untuk meraih kekuasaan dengan mengubah Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi berpusatkan pada syariat Islam. Pihak-pihak beraliran garis keras ini berpotensi mengubah Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, ras berbeda-beda. Hal yang sangat dikhawatirkan mungkin terjadi apabila Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila diubah dan berakibat pada bubarnya atau pecahnya persatuan Indonesia. “Sebab melalui semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”, terkandung prinsip persatuan dan kesatuan bangsa yang mencerminkan pluralitas dan heterogenitas dalam masyarakat Indonesia (Lestari, 2015: 31)”.

Dilansir dari DetikNews, terdapat 31 kasus intoleransi di Indonesia sejak November 2018 hingga November 2019 dan mayoritas kasus intoleransi tersebut yakni pelanggaran ibadah (Alfons, 2019). Kasus-kasus ini berkisar dari perusakan rumah ibadah, pelanggaran kebudayaan etnis tertentu, tata cara berpakaian keagamaan, imbauan mewaspadaikan aliran tertentu, hingga penolakan bertetangga dengan agama lain. Berdasarkan hasil pemantauan The Wahid Institute, sepanjang tahun 2010 ditemukan data sejumlah 64 kasus pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan (The Wahid Institute, 2010). Kemudian, pada tahun 2011 ditemukan 267 kasus (The Wahid Institute, 2011), 278 kasus dengan 363 tindakan pada tahun 2012 (The Wahid Institute, 2012), dan 245 kasus atau peristiwa dengan 278 tindakan pada tahun 2013 (The Wahid Institute, 2013) . Laporan terakhir The Wahid Institute ada pada tahun 2014 yang menunjukkan bahwa terdapat 158 peristiwa pelanggaran dengan 187 tindakan (The

Wahid Institute, 2014). Yang memprihatinkan, pelaku pelanggaran kebebasan beragama paling banyak berasal dari pemerintah daerah dan aparat kepolisian.

Menurut pemaparan Ardimanto Adiputra – Koordinator Program Penelitian Imparsial, pelaku intoleran paling banyak didominasi oleh kelompok masyarakat. Mereka menggerakkan masyarakat sekitar untuk melakukan tindakan intoleransi. Selain itu, peraturan negara yang membatasi kebebasan beragama dan hukum belum diimplementasikan secara tegas. Sejumlah konflik tersebut masing-masing memiliki penyebabnya sendiri. Ada yang dipicu karena perbedaan kesenjangan etnis, agama, politik, dan persoalan-persoalan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) lainnya. Namun, kebanyakan konflik tersebut dipicu oleh sentimen keagamaan dan kepercayaan yang berbeda. Sebagai contoh, konflik yang terjadi di Poso antara umat Islam dan Kristen, pembangunan tempat ibadah dan perbedaan pemahaman tentang doktrin keagamaan (Tempo.co, 2019).

Konflik antar agama merupakan sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat dan dianggap masih sangat tabu dan sensitif. Konflik itu sendiri adalah apabila masing-masing berusaha menghancurkan atau mencelakakan pihak lain. Apabila keadaan semacam ini tidak menemukan jalan keluar atau pemecahannya, maka tidak mustahil akibat negatif selalu merongrong ketenteraman manusia dalam masyarakat (Puspawijaya, 2010).

Menurut Deniawati (2014, h.4), “salah satu penyebab terjadinya konflik adalah akibat dari lemahnya pemahaman dan pemaknaan masyarakat tentang konsep kearifan budaya lokal masyarakat Indonesia yang plural.”. Konflik sosial akan muncul apabila

tidak ada distribusi nilai yang adil kepada masyarakat. Terdapatnya perbedaan agama dan kepercayaan pada masyarakat menjadi penanda awal yang secara realitasnya sudah dilabelkan hambatan-hambatannya, yakni prasangka. Rasa prasangka ini sangat sensitif karena melibatkan sikap seseorang ataupun kelompok tertentu terhadap yang lainnya. Padahal, keberagaman merupakan inti dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Tanpa semangat keragaman, bangsa Indonesia akan mengalami kehancuran karena konflik antar agama dan kepercayaan akan terjadi di setiap wilayah. “Mengingat bangsa Indonesia sangat beragam dan salah satunya agama merupakan fungsi untuk menjaga keragaman (Deniawati, 2014: 5).”.

Pluralisme berasal dari 2 kata, yaitu plural yang berarti beragam dan isme yang berarti paham. Berdasarkan Webster's Revised Unabridged Dictionary dalam Dzakie (2014, h.81), istilah pluralisme secara keseluruhan memiliki beberapa macam arti, yaitu 1) Hasil atau keadaan menjadi plural; 2) Keadaan seorang pluralis; memiliki lebih dari satu tentang keyakinan gerejawi; 3) Berarti beragam pemahaman, atau bermacam-macam paham. Sedangkan pluralisme agama adalah sebuah terminologi yang memiliki makna luas dan berkaitan dengan penerimaan terhadap agama yang berbeda-beda, namun salah satunya dapat dikatakan sebagai pandangan dunia yang menyatakan bahwa agama seseorang bukanlah satu-satunya sumber yang eksklusif terhadap kebenaran dan dapat ditemukan dalam agama-agama lain yang tentunya memiliki nilai-nilai yang benar. Selain itu dapat berarti juga upaya untuk mempromosikan suatu tingkat kesatuan, kerja sama, dan pemahaman yang lebih baik antar agama-agama dan berbagai denominasi dalam satu agama (Dzakie, 2014: 81-82).

Namun pada sisi negatifnya, keberagaman yang berada di tengah-tengah masyarakat dapat menjadi penyebab munculnya beragam konflik dan kekerasan yang berlangsung di berbagai tempat di Indonesia .

Terdapat beberapa macam karakteristik masyarakat majemuk oleh Pierre van den Berghe dalam Nasikun (1993, h.33) yang dapat mendasari alasan mengapa perbedaan dapat memunculkan konflik di tengah masyarakat, yakni: 1) Terjadinya segmentasi dalam bentuk kelompok-kelompok yang sering kali memiliki kebudayaan yang berbeda satu sama lain; (2) Memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga yang bersifat non-komplementer; (3) Secara relatif seringkali mengalami konflik-konflik diantara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain; (4) Serta adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok-kelompok yang lain.

Salah satu bentuk pluralitas yang menjadi penyebab konflik adalah pluralitas agama. Konflik tersebut muncul di kalangan masyarakat, salah satunya karena adanya sikap kebanggaan terhadap kelompok agamanya secara berlebihan dan menganggap agamanya paling benar.

Budhi Muanawar Rahman (1995: 31) yang dikutip oleh Ahmad Baso (1999: 23-24) menyatakan bahwa pluralisme hadir dalam rangka membangun toleransi di tengah perbedaan dan keragaman. Karena itu, pluralisme bukan hanya berarti *actual plurality* (kemajemukan atau keanekaragaman) yang justru menggambarkan kesan fragmentasi, bukan juga sekedar “kebaikan negatif” sebagai lawan dari fanatisme, melainkan harus dipahami sebagai “pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban” (*genuine engagement of diversity within the bonds of civility*) (Deniawati, 2014: 5).

Menurut Din Syamsudin – Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antaragama dan Peradaban, intoleransi yang menguat di masyarakat akhir-akhir ini seharusnya dapat diatasi. Pada prinsipnya, watak dan warna dasar bangsa Indonesia cenderung kepada kasih sayang, kerukunan, harmoni, dan perdamaian (Suryowati, 2017). Watak ini sama halnya dengan agama-agama yang datang ke Indonesia, yaitu membawa atau mengajarkan kasih sayang, kerukunan, harmoni, dan perdamaian. Ditambah lagi dengan adanya nilai-nilai dasar bangsa Indonesia berupa kesepakatan damai dalam wujud Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Keduanya menjadi modal dasar yang diwariskan pendiri bangsa dalam menjalani kehidupan bernegara yang tenteram dan damai. Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan jalan tengah yang penting bagi masyarakat majemuk (Suryowati, 2017).

Maka dari itu, kerukunan antar umat beragama harus dipelihara dari waktu ke waktu, karena hal tersebut merupakan pilar penting dalam kesatuan bangsa.

Kerukunan hidup antar umat beragama sendiri berarti keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Nazmudin, 2017: 24).

Kerukunan antar umat beragama juga dapat diartikan sebagai toleransi antar umat beragama. Di dalam toleransi, pada dasarnya masyarakat harus bersikap lapang dada dalam menerima perbedaan umat beragama dan saling menghormati satu sama lain, seperti tidak saling mengganggu pemeluk agama lain yang sedang beribadah.

Salah satu tokoh yang berhasil membuat model pendekatan yang mengajarkan perdamaian dan kebhinekaan di Indonesia adalah Inayah Wulandari Wahid. Sosok wanita yang biasa dipanggil dengan Inayah Wahid ini adalah putri keempat dari mendiang Abdurrahman Wahid, presiden ke-4 Republik Indonesia. Inayah Wahid merupakan salah satu tokoh yang berperan besar dalam gerakan di Indonesia yang mewakili dukungan terhadap pluralisme, seperti Setara Institute dan The Wahid Institute. Beliau mencetuskan salah satu gerakan berbentuk organisasi yang mendukung pluralisme dan memfokuskan diri kepada generasi muda, yaitu *Positive Movement*. *Positive Movement* menasar kalangan pelajar dan mahasiswa dengan rentang usia 17-25 tahun. Salah satu program dari organisasi ini adalah dengan mengembangkan kebiasaan positif dalam mewujudkan kehidupan keseharian yang bahagia lewat program *self-healing*, *camp* dan kelompok berbasis *peer-group*. Tidak disangka, gerakan yang ternyata berhasil menarik kaum muda untuk bergabung ini berfokus untuk menyebarkan nilai-nilai positif seperti kebahagiaan, harapan, semangat, dan kemauan untuk maju.

Selain melalui organisasi *Positive Movement*, Inayah juga berpartisipasi sebagai pengurus dalam *The Wahid Institute* atau yang biasa dikenal sebagai Jaringan

Gusdurian. Inayah juga menyebarkan nilai-nilai pluralisme dan toleransi melalui unggahan-unggahan pada media sosialnya berupa Instagram dan Twitter dengan *username* @inayawahid. Melalui media sosial, ia dapat lebih menyentuh segala lapisan kalangan, termasuk generasi muda yang cenderung lebih terpapar oleh pengaruh dari dunia maya. Dengan memanfaatkan *platform* Twitter dan Instagram, Inayah menyuarakan semangat kebhinekaan lewat kontennya yang berisi ajakan-ajakan untuk lebih menghormati persatuan, menghargai perbedaan, serta untuk saling tolong-menolong tanpa memandang ras, suku, dan agama.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana Inayah Wahid beserta organisasi *Positive Movement* yang ia prakarsai dapat mempengaruhi persepsi masyarakat Indonesia yang berawal dari kaum muda akan pentingnya pemahaman akan pluralisme dan kesadaran akan pentingnya toleransi melalui pendekatan positif dalam memberantas radikalisme, perpecahan bangsa, dan konflik antar SARA.

I.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, telah teridentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Dilihat dari situasi yang dihadapi di atas, muncul gerakan-gerakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pluralisme di Indonesia, seperti gerakan sosial

2. Gerakan-gerakan tersebut melakukan aktivitas dengan tujuan menyebarkan paham pluralisme, termasuk pluralisme agama. Perbedaan dari segi SARA dapat memancing perpecahan terhadap sesama saudara bangsa.

I.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah ditetapkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

“Bagaimana pandangan Inayah Wahid mengenai pluralisme serta cara penyebarluasan terhadap pandangan pluralisme tersebut?”

I.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan dari media sosial Twitter dan Instagram serta organisasi *Positive Movement* dalam penyebaran nilai-nilai pluralisme dan toleransi yang dianut oleh Inayah Wahid terhadap kesadaran masyarakat, terutama kaum muda di Indonesia.

I.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis sebagai berikut :

1. Manfaat teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan informasi mengenai pluralisme di Indonesia, serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang terkait.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Universitas Pelita Harapan

Penelitian ini dapat menambah koleksi penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa sehingga dapat digunakan sebagai sumber dalam menambah wawasan yang berkaitan dengan pluralisme.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah referensi mengenai pluralisme di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Komunikasi.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat Indonesia perihal pluralisme.

d. Bagi Peneliti

Penelitian ini dibuat untuk memenuhi persyaratan tugas akhir Seminar *Integrated Marketing Communications* (IMC). Selain itu, peneliti dapat mengetahui lebih dalam mengenai pluralisme dan toleransi antar golongan masyarakat.